

**PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH
PERUSAHAAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NABIRE PAPUA
TAHUN 2004-2013**

*THE EFFECT OF INCOME EACH CAPITA, NUMBER OF ESTABLISHMENTS AND
NUMBER OF RESIDENTS OF REVENUE RECEIPTS IN NABIRE PAPUA REGENCY
IN THE YEAR 2004-2013*

Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang
*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia*

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih profesional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire Papua pada tahun 2004-2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, Pendapatan perkapita, Jumlah perusahaan dan Jumlah penduduk

ABSTRACT

Revenue is expected to provide significant contribution towards the budget of the Region. Therefore, local revenues must be managed more professionally and is expected to support efforts to improve the economy, a source of financing for the governance and development. The purpose of this study is to know the effect of income each capita, number of establishments and number of residents of revenue receipts in Nabire Papua regency in the year 2004-2013. The analytical tool used is multiple linear regression with significance level of 5% for each statistical test. Hypothesis showed that each capita income variables have positive and statistically significant, the variable number of people have negative and statistically significant, the variable number of residents have no statistically significant effect on local revenues. The coefficient of multiple determination obtained registration by 0.984, meaning that the model used in this study showed that independent variables can only explain the dependent variable at 98.4%, while the remaining 1.6% described by other variables outside the model of this research.

Keywords: local original income, income each capita, number of firms and number of residents

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah sendiri (Provinsi/Kabupaten) dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor-faktor yang dapat dikendalikan yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan, dan yang tidak dapat dikendalikan, yaitu variabel-variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka mendorong penulis untuk meneliti tentang pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013.

Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013?
2. Apakah jumlah perusahaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013 ?
4. Apakah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD ?

Tinjauan Pustaka

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat bagi pembiayaan pembangunan. Dengan demikian Pemda dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai. Keberadaan *socialoverhead capital* menentukan Keberhasilan Negara dalam diversifikasi produk, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup. bagi Pemda.

Potensi Keuangan Daerah

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah sendiri (Provinsi/Kabupaten) dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor-faktor “yang dapat dikendalikan” (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan), dan “yang tidak

dapat dikendalikan”, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah, beberapa factor-faktor tersebut adalah :

1. Kondisi Awal Suatu Daerah;

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan :*Pertama*, Besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi atau rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu. Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah dari pada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri).

2. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan;

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, tiga hal yang harus diperhatikan adalah: a). Menambah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi

3. Perkembangan PDRB Perkapita Riil;

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah (Provinsi/ Kabupaten), semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya.

4. Pertumbuhan Penduduk;

Dalam hal tertentu, besarnya pendapatan dapat dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat Inflasi;

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak pembangunan I dan PBB. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. Penyesuaian Tarif;

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak, retribusi atau leges yang tarifnya ditentukan secara tetap (flat), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan daerah. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.

7. Pembangunan Baru;

Penambahan pendapatan dapat juga diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

8. Sumber Pendapatan Baru;

Adanya kegiatan usaha dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer dan lain-lain.

9. Perubahan Peraturan;

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, jelas akan meningkatkan pendapatan daerah.

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri dari: 1). Desentralisasi; 2). Dekonsentrasi; 3). Tugas pembantuan; dan. 4). Pinjaman daerah.

1. Desentralisasi Fiskal;

Sejalan dengan tuntutan demokratisasi dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami perubahan. Sistem pemerintahan yang semula lebih condong pada sentralisasi menjadi desentralisasi. Selaras dengan perubahan sistem tersebut, maka tata aturan juga mengalami perubahan yang lebih mengarah kepada penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah, melalui pemberian kewenangan yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Dekonsentrasi;

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah dinas Provinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Provinsi. Latar belakang adanya dekon ini karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah.

3. Tugas Pembantuan;

Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa bentuk hubungan tugas pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, hanya yang menjadi sasaran. Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Disamping itu, pihak yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusat tapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Kecamatan sampai ke Desa.

4. Pinjaman Daerah;

Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk diatas dalam hal sumber pembiayaannya. Untuk membiayai kebutuhan. Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan perse tujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swasta atau masyarakat langsung. Penggunaan :

- a) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana yang akan menjadi aset Daerah. Selain memberikan manfaat bagi pelayanan umum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman;
- b) Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan kas Daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU RI, No. 33 Tahun 2004 Sebagai perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari ;

Setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juctio Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak daerah terdiri dari : 1). Pajak Hotel; 2). Pajak Restoran; 3). Pajak Hiburan; 4). Pajak Reklame; 5). Pajak Penerangan jalan; 6). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 7). Pajak Parkir; 8). Pajak perusahaan Emas 9). Pajak perusahaan sarang burung wallet.

Sedangkan Retribusi daerah dibagi atas 3 golongan yaitu : Retribusi jasa umum; 2. Retribusi jasa usaha; 3. Retribusi perijinan tertentu.

2. Dana Perimbangan;

Berpedoman pada ketentuan dan penetapan pagu dana perimbangan 2007 dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan pusat dan daerah terdiri dari: a). Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam; b). Dana alokasi umum; c). Dana alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Mengenai pengenaan pajak daerah, dan retribusi daerah atas penyediaan jasa, pemerintah daerah telah menyederhanakan berbagai jenis retribusi berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variable-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut (Wihana Kirana: 2002) beberapa factor tersebut adalah :

a. Kondisi Awal Suatu Daerah;

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan : besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan Komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial dan politik, kemampuan administratif, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

b. Peningkatan Cakupan;

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang meliputi menambah objek atau subjek retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, mengurangi tunggakan.

c. Perkembangan PDRB;

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

d. Pertumbuhan Penduduk;

Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan sesara proporsional.

e. Tingkat Inflasi;

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif. Penyesuaian tarif Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan pendapatan.

f. Pembangunan Baru;

Penambahan pendapatan diperoleh bila ada pembangunan baru. Misalnya: Pembangunan pasar, pembangunan terminal.

g. Sumber Pendapatan Baru;

Adanya kegiatan yang mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Perubahan peraturan-peraturan baru yang berhubungan dengan pajak atau retribusi, akan meningkatkan pendapatan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini akan dirinci antara lain obyek dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengolahan data dan teknik analisa data. Teknik analisis dilengkapi dengan uji asumsi klasik, yaitu : uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Obyek dan Desain Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data dasar BPS dan DPPKAD Kabupaten Nabire Papua. Desain penelitian berdasarkan pengamatan atas fenomena masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah kabupaten Nabire Papua dari perspektif kualitas pelayanan dengan menggunakan landasan teori yang baku dan teruji.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan;

Tehnik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan yang dipelajari dan digali dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung dengan permasalahan atau obyek yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder;

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang mendukung penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel pengaruh (variabel independen), dan variabel terpengaruh (variabel dependen) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Variabel independen adalah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk.
2. Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Peneliti menyusun pedoman koding, yang digunakan sebagai panduan dalam membuat variabel terhadap data-data *times series*.
- b. Setelah diberi kode, data diolah menurut masing-masing variabel dengan program *SPSS versi 17*
- c. Kemudian dilakukan uji analisis data.

Tehnik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows ver. 16* dengan tingkat kemaknaan untuk menolak hipotesis nol adalah $< 0,05$ untuk setiap uji statistik. Langkah-langkah regresi linier berganda yang dilakukan :

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mencari hubungan sekaligus pengaruh suatu variabel yang bermakna dengan persamaan *double logaritma natural (Ln)* :

Uji Statistik

- a). **Uji Ketepatan Parameter Penduga (estimate)**
Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- b). **Uji Ketepatan Model**
Uji ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara bersama-sama/ simultan, dengan Uji hipotesis .
- c.) **Koefisien Determinasi Ganda (R^2) :**
Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik tidaknya regresi yang terestimasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Nabire terletak di Kawasan Teluk Cenderawasih Provinsi Papua dan Samudra Pasifik, yang berada di atas 3 (tiga) lempengan bumi sehingga mengakibatkan rawan akan terjadinya gempa bumi.

Tugas pokok dan fungsi

- a) Tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pemerintahan bantuan dalam bidang Perdagangan dan Perpajakan Daerah.
- b) Fungsi: (i) Pelaksanaan sebagian tugas teknis oprasional dan atau tugas teknis penunjang Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (ii) Pelaksanaan urusan administrasi (iii) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah

Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah

- a) VISI sebagai berikut:
“Menjadi Dinas terdepan dalam Inofasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”
- b) MISI sebagai berikut:
“Mewujudkan Pendapatan yang optimal dan mampu meningkatkan produktifitas rakyat”
 Dengan pelayanan prima dan pemerintahan yang entrepreneur Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai maksimal setiap tahunnya.

Dekripsi Data Variabel-Variabel Penelitian

1. Penerimaan PAD

Variabel PAD dalam penelitian ini diartikan sebagai penerimaan PAD Dinas Perpajakan dan Perdagangan Daerah Kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013. Pengukuran variabel penerimaan PAD dinyatakan dalam jumlah rupiah pertahun.

Tabel 1. Pertumbuhan PAD Tahun 2004-2013

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
2004	689,976,876,324	101,09
2005	697,754,478,903	100,34
2006	714,183,672,942	121,04
2007	703,253,436,129	108,20
2008	724,458,237,174	124,27
2009	753,432,648,135	113,36
2010	715,864,804,203	114,70
2011	741,046,489,704	105,09
2012	798,454,328,566	101,92
2013	1,018,906,530,235	111,19

Sumber BPS Kab. Nabire 2013

2. Pendapatan Perkapita

Variabel pendapatan perkapita dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan perhitungan bahwa PDRB berdasarkan harga konstan

dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire tahun 2004-2013.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita

Tahun	Pendapatan Perkapita	Pertumbuhan (%)
2004	10,362,584	8,31
2005	14,735,831	5,92
2006	13,563,914	12,11
2007	15,642,314	7,32
2008	18,473,143	6,93
2009	12,745,134	4,58
2010	14,327,922	11,13
2011	15,703,343	5,77
2012	17,460,740	7,49
2013	19,931,633	8,59

Sumber BPS Kab. Nabire 2013

3. Variabel Jumlah Perusahaan

Variabel Jumlah Perusahaan dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah perusahaan selama tahun 2004-2013. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Nabire pada tahun 2013. Pengukuran jumlah perusahaan dinyatakan dalam perusahaan pertahun.

4. Jumlah Penduduk

Variabel Jumlah Penduduk dalam penelitian ini diartikan sebagai totalitas sejumlah warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengukuran jumlah penduduk dinyatakan dalam jumlah jiwa pertahun.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data-data variabel hasil oleh data penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah dengan program SPSS 17 maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Durbin-Watson
1.632

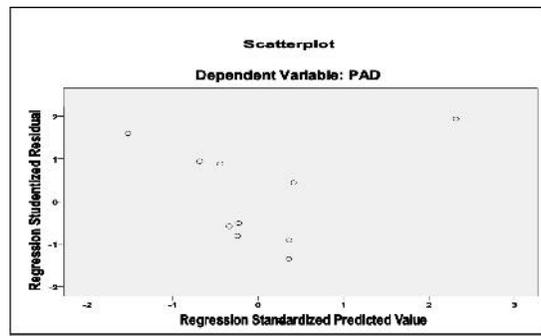
Hasil uji autokorelasi terhadap variabel-variabel penelitian ini menunjukkan angka Durbin Watson sebesar (DW) 1,477. Karena nilai DW adalah $-2 < 1,632 < 2$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan Per Kapita	0.757	1.322
Jumlah Perusahaan	0.960	1.042
Jumlah Penduduk	0.754	1.326

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel Pendapatan Per Kapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk adalah lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas didalam variabel penelitian ini.

3. Uji Heterokedastisitas



Hasil uji Heteroskedastisitas memperlihatkan sebaran plot dalam scatterplot tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang rapi dan teratur. Oleh karena itu berdasarkan hal ini maka di dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

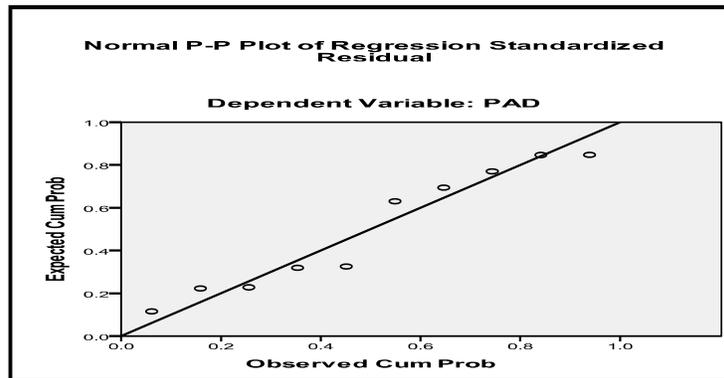
4. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data-data tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini apakah sudah tersebar secara normal atau tidak. Sebelum digunakan dalam model regresi berganda maka variabel-variabel penelitian perlu di uji kenormalan datanya. Asumsi yang digunakan adalah bahwa data penelitian adalah data yang tersebar secara normal atau tersebar mendekati sumbu regresi. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Test Kolmogorov-Smirnov* dengan *Software Program SPSS 17*. Hasil uji normalitas data adalah sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
Indikator		PAD	Pendapatan Perkapita	Jumlah Perusahaan	Jumlah Penduduk
N		10	10	10	10
Normal Parameters	Mean	27.3450	16.5280	5.2270	11.8070
	Std. Deviation	.11588	.19217	.35242	.02359
Most Extreme Differences	Absolute	.283	.113	.258	.164
	Positive	.283	.113	.258	.164
	Negative	-.232	-.101	-.155	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.894	.359	.817	.520
Asymp. Sig. (2-tailed)		.401	1.000	.517	.950

Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel bebas Pendapatan Per Kapita adalah 1,000 variabel Jumlah Perusahaan sebesar 0,517 dan variabel terikat PAD sebesar 0.041. Oleh karena ketiga variabel bebas memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tersebar secara normal.

Selain menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov maka uji normalitas data dalam penelitian ini juga diuji dengan uji PP-Plot of Regression Standardized Residual dari data penelitian. Hasilnya adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil uji PP Plot maka dapat dilihat sebaran residu dari data penelitian berada disekitaran garis regresi dan menyebar teratur tidak menjauh dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebar secara normal.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	-7.200	12.130		-.594
Pendapatan Per Kapita	.188	.136	.312	1.385
Jumlah Perusahaan	.117	.066	.355	1.775
Jumlah Penduduk	2.611	1.107	.532	2.360

Persamaan Regresi $Y = -7,2 + 0,188X_1 + 0,117X_2 + 2,611X_3$. Interpretasi dari persamaan regresi ini adalah sebagai berikut :

- Jika variabel bebas Pendapatan Per Kapita (X1), Jumlah Perusahaan (X2) dan Jumlah penduduk adalah nol maka PAD bernilai - 7,2.
- Jika pendapatan per kapita meningkat sebesar 1 % maka PAD juga akan meningkat sebesar 0,188 %.
- Jika jumlah perusahaan bertambah sebesar 1 % maka PAD juga akan meningkat sebesar 0,117 % .

Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara Parsial Atau Sendiri-Sendiri

Dapat dilihat dalam nilai uji t_{hitung} kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Hasil adalah sebagai berikut :

- t_{hitung} untuk variabel pendapatan per kapita = 1,385 sedangkan t tabel ($0,05/2 ; 10-3$ menjadi $0,025 ; 7$) memiliki nilai t tabel sebesar : 2,365. Hasil ini menunjukkan bahwa t tabel (2,365) > t_{hitung} (1,385), dengan demikian maka variabel pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.
- t_{hitung} untuk variabel jumlah perusahaan = 1,775 sedangkan t tabel ($0,05/2 ; 10-3$ menjadi $0,025 ; 7$) memiliki nilai t tabel sebesar : 2,365. Hasil ini menunjukkan bahwa t tabel (2,365) > t_{hitung} (1,385), dengan demikian maka variabel jumlah perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.
- t_{hitung} untuk variabel jumlah penduduk = 2,360 sedangkan t tabel ($0,05/2 ; 10-3$ menjadi $0,025 ; 7$) memiliki nilai t tabel sebesar : 2,365. Hasil ini menunjukkan bahwa t tabel (2,365) > t_{hitung} (2,360), dengan demikian maka variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel secara Bersama-sama atau Simultan

Pengaruh variabel pendapatan per kapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk terhadap PAD kabupaten Nabire dapat dilihat dalam hasil uji F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Hasilnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Nilai F_{hitung} adalah sebesar 6,705
- ❖ Nilai Ftabel untuk 3 variabel bebas (k=3) dengan n-k (10-3) atau 3 variabel bebas dan n = 7 adalah 4,35
- ❖ Nilai F_{hitung} (6,705) > Nilai F tabel (4,35), dengan demikian maka secara bersama-sama atau simultan maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Korelasi antara Variabel bebas terhadap Variabel Terikat

Korelasi atau keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat dalam besarnya hasil uji korelasi yakni uji R :

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.770	.655	.06803

Hasil uji R menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara 3 variabel bebas dalam penelitian ini dengan variabel terikat adalah sebesar 87,8 % . Hal ini berarti bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang erat dan kuat yang bersifat positif

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013.
2. Jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013.
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013.
4. Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap PAD di Kabupaten Nabire.

Saran

Pemerintah Kabupaten Nabire perlu memperhatikan kondisi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan kualitas pendapatan per kapita, keberadaan perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Nabire dan kualitas kehidupan penduduk sebab ketiga variabel ini sesungguhnya memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan membayar kewajiban terhadap negara dalam hal ini terhadap pemerintah Kabupaten Nabire yang berhubungan dengan peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Devas, Nick.al. 1989.(Peny.).*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- (2) Hakki, D.2008. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor [skripsi]*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- (3) Halim, Abdul.2001.*Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*: Penerbit Bunga Rampai
- (4) Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- (5) Kuncoro, Haryo.2007. *Fenomena Flaypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9. No. 1. Hal 47-63.
- (6) Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- (7) Mulyanto.2002. "*Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosaren Propinsi Jawa Tengah (The Potential of Local Government Revenue : A Case Study in Subosuka Wonosaren District, Central Java Provinces)*". Economics Faculty Sebelas Maret University. Surakarta.
- (8) Nusa Dewanti, Anggita.2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten) [skripsi]*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- (9) Rahdian, D. P.2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah [skripsi]*. Bogor: Institut pertanian Bogor.
- (10) Rahmawati ruswandi, Rina.2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang [skripsi]*.